

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang:UB Press.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu, Cetakan Ketiga puluh dua (revisi)*, Jakarta: IAI.
- Isnaini, Siti. 2018. “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2014-2016”. *Simki UnpKediri*, 2(7), Retrieved from http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018
- Jenni, H. P. 2018. “Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur”. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- M. Nasir. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah". *Jurnal Dinamika Pembangunan*, vol.2, no.1, pp. 30-45,. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Madiasm. 2019. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta : Andi
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Nomor 7, Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah*.
- Resti, A. I. S. 2018. “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak.Tesis tidak diterbitkan”. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

- Siswanto, Hadi Eko dan Deden Tarmidi. 2020. *Akuntansi Pajak Teori Dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti, Resmi. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sumarsan, Thomas. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat 3 Tahun 1945, Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 33, Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.*
- Wijaya, Purna, Dwi, Ngurah, Gusti, I, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja. 2015. “*Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem*”. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 2(1).

Retrieved

from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4354/3358>

Yusran, R. R., & Siregar, D. L. 2018. *“Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau”*. *Aksara Public*, 1(3), 73-84. Retrieved from <http://aksarapublic.com/index.php/home/article/view/39>.
<https://bappeda.tangerangselatankota.go.id/main/news/view/383>
<https://anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-citra-daerah-kota-tangerang-selatan-dalam-arsip-1586393818>
<https://banten.antaranews.com/berita/18055/pad-tangerang-selatan-meningkat-setiap-tahun>

